

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Karakteristik yang dianalisis mencakup ukuran pemerintah daerah (total aset), tingkat kekayaan daerah (rasio PAD terhadap pendapatan total), ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (rasio DAU terhadap pendapatan total), serta belanja modal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas publik dan upaya evaluasi kinerja pemerintahan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagai instrumen pengukuran resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi logistik ordinal. Populasi penelitian terdiri atas 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling berdasarkan kelengkapan data tahun 2022. Data diperoleh dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri, BPK, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Variabel dependen adalah skor kinerja pemerintah daerah provinsi, sedangkan variabel independennya meliputi ukuran daerah, tingkat kekayaan, ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sementara temuan audit BPK berpengaruh negatif secara signifikan. Adapun variabel tingkat kekayaan, ketergantungan fiskal, dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap skor kinerja. Temuan ini mendukung teori agensi yang menekankan pentingnya pengawasan eksternal dan transparansi dalam menekan asimetri informasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan tata kelola daerah yang lebih akuntabel.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Audit BPK, Ukuran Daerah, Ketergantungan Fiskal, Belanja Modal.